

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini adalah merupakan wujud penilaian atas integritas seorang wakil masyarakat, konsistensi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat ini wajib dilakukan oleh semua anggota legislatif. Secara formal proses penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD dapat dilakukan saat dilaksanakannya rapat dengar pendapat di DPRD dan pada saat dilaksanakannya reses ke daerah pemilihan. Lalu setelah dilakukannya penyerapan tersebut maka anggota DPRD bersangkutan harus Menyusun dokumen yang nantinya akan dibicarakan didalam musyawarah anggota DPRD yang disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Dan nantinya akan dikomunikasikan dengan dinas terkait jika hal tersebut berhubungan dengan infrastruktur. Setelah hal tersebut dilakukan maka tertuanglah pada salah satu lembaran evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi tersebut dapat diketahui sampai sejauh mana kinerja yang akan diwujudkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun ditentukannya pokir. Setelah itu baru dituangkan didalam RAPBD. Setelah hal tersebut dapat disetujui oleh pihak bersangkutan maka dapat dijabarkan didalam APBD.
2. Anggaran merupakan rencana kerja pemerintah dalam periode tertentu. Selain itu anggaran merupakan indikator penting dalam

mengambil kebijakan ekonomi yang dimiliki pemerintah dan menggambarkan pernyataan komprehensif tentang suatu negara, dimana warga negara bergantung pada negara untuk menyediakan pelayanan yang prima dan infrastruktur. Karena politik anggaran yang menjadi dimensi penting dalam pengalokasian anggaran yang berorientasi pada kepentingan masyarakat pada otonomi daerah desentralisasi yang sekarang ini dihadapkan dengan persoalan pengelolaan pemerintahan, karena beberapa program pemerintah baik ditingkat kabupaten, propinsi maupun pusat membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga dibutuhkan sebuah transparansi dan kemampuan dalam mengelola program keuangan. Saat ini anggaran pokok DPRD dianggap sudah cukup, karena besaran jumlah itu sangat relatif yang penting mengalokasikan dengan tepat, sepanjang sesuai dengan permintaan masyarakat, bukan berdasarkan keinginan . Oleh sebab itu perlu menghimpun aspirasi kepada masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan

3. Setiap anggota DPRD harus menjalin kerjasama dengan sebaik mungkin dengan masyarakat di daerah pemilihannya untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari konstituennya. Dalam pola relasional, anggota DPRD menyadari bahwa konstituen memiliki peran penting dalam berbagai aktivitas DPRD. Demikian juga sebaliknya , konstituen pun menyadari pentingnya. Berperan serta dalam berbagai aktivitasnya di DPRD dan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan publik di DPRD melalui anggota DPRD. Dan

pada hakikatnya, pokir adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota DPRD pada konstituennya, karna anggota DPRD cenderung melaksanakan kegiatan dibasis suara yang memilihnya pada saat pemilu.

## **B. Saran**

1. Karena mekanisme terlalu panjang dan kurangnya transparan ditengah masyarakat maka menurut saya harus adanya penyederhanaan dalam pelaksanaan pokir dan juga membuat masyarakat bingung. Terkadang kegiatan yang dilakukan atas realisasi pokir dianggap tidak penting, sementara itu kegiatan yang dianggap lebih penting didalam masyarakat malah “hilang” pada saat mekanisme pokir DPRD sehingga pada akhirnya tidak tertuang didalam APBD.
2. Seharusnya pengalokasian anggaran didalam pokir DPRD benar-benar harus diperhatikan oleh pihak yang bersangkutan karena kadang didalam APBD telah adanya penganggaran untuk suatu daerah tetapi tidak dicek terlebih dahulu. Sehingga adanya tumpang tindih penganggaran yang akan dilaksanakan pada suatu wilayah.
3. Seharusnya relasi yang dibangun antara anggota DPRD dengan konstituennya benar-benar terjalin hubungan yang baik dan mementingkan kepentingan bersama tidak hanya kepentingan pribadi atau hanya kepentingan suatu organisasi masyarakat tertentu saja, sehingga kepercayaan yang akan dibangun antara

konstituennya kepada anggota DPRD mendapat satu tekad yang bulat dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

